

Universitas Ngudi Waluyo  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora  
Skripsi Desember 2025  
Salsabela Oktaviona Devi  
114221011

**MODEL PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN ANAK MELALUI DIVERSI (Studi Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2025/PN Unr)**

**ABSTRAK**

Negara memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Mengingat anak adalah amanah dengan harkat yang harus dijaga, penanganan tindak pidana anak seperti pencurian yang marak dipicu faktor sosial dan ekonomi mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim pada tindak pidana pencurian (Studi Putusan Nomor 7/Pid. Sus-Anak/2025/PN Unr mengenai penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Ungaran Kabupaten Semarang.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Kemudian metode pengumpulan data dan analisis data dilakukan dengan dua metode lapangan dan kepustakaan, dan Teknik pengelolaan data dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu reduksi data, analisis data, penyajian data kemudian membuat keimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian pertimbangan hakim pada tindak pidana pencurian (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr yaitu hakim mempertimbangkan fakta kejadian pencurian oleh anak, hakim menilai latar belakang anak (pelajar, belum pernah dihukum, kemungkinan faktor sosial seperti kemiskinan), serta laporan Bapas yang merekomendasikan pembinaan. Model penegakan hukum terhadap pencurian anak melalui diversi. Anak pelaku memenuhi syarat wajib untuk menjalani proses diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Syarat-syarat tersebut terpenuhi karena Ancaman Hukuman di Bawah 7 Tahun. Meskipun didakwa dengan Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), ancaman pidananya masih di bawah 7 tahun penjara. Bukan Pengulangan Tindak Pidana (Bukan Residivis). Ini adalah tindak pidana yang pertama kali dilakukan oleh anak tersebut. Saran penelitian agar penyidik dan penuntut umum disarankan untuk lebih proaktif dan optimal dalam mengupayakan diversi di tahap awal (penyidikan/penuntutan). Kegagalan diversi di tahap awal seringkali membebani hakim di persidangan. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) sangat sentral. Kapasitas dan jumlah PK Bapas perlu

ditingkatkan agar laporan Litmas dan proses pengawasan pasca-putusan dapat berjalan maksimal di seluruh wilayah. Mengevaluasi dampak jangka panjang dari putusan pidana bersyarat terhadap perilaku anak setelah masa percobaan berakhir, untuk memvalidasi efektivitas model penegakan hukum restoratif ini.

**Kata Kunci:** Penegakkan hukum, Anak, Diversi, Perlindungan Anak, Tindak Pidana Ringan

Ngudi Waluyo University  
Study Program of Legal, Faculty of Economics, Law, and Humanities  
Final Project December 2025  
Salsabela Oktaviona Devi  
114221011

***Law Enforcement Model in Child Abduction Crimes Through Diversion (Case Study of Decision No. 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr)***

**ABSTRACT**

*The state provides special protection for children in conflict with the law through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). Considering that children are a trust with dignity that must be protected, the handling of juvenile crimes such as theft, which are often triggered by social and economic factors, prioritizes a restorative justice and diversion approach. This study aims to determine and analyze the judge's considerations in the crime of theft (Decision Study Number 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN-Unr) concerning the resolution of criminal cases committed by minors at the Ungaran District Court, Semarang Regency.*

*This research is descriptive analytical. The data sources used in this study are primary and secondary data. Data collection and analysis were conducted using two methods: fieldwork and library research. Data management and analysis techniques were carried out through four stages: data reduction, data analysis, data presentation, and drawing conclusions.*

*Based on the results of the study, the judge's considerations in the crime of theft (Decision Study Number 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN-Unr) include the judge considering the facts of the theft by a child, the judge assessing the child's background (student, never been convicted, possible social factors such as poverty), and the Bapas report recommending guidance. The law enforcement model for child theft is through diversion. The child perpetrator meets the mandatory requirements to undergo the diversion process under Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System. Juvenile Criminal Justice (Juvenile Justice Law). These requirements are met because the sentence is under 7 years. Although charged under Article 363 of the Criminal Code (aggravated theft), the sentence is still under 7 years in prison. This is not a repeat offense (not a recidivist). This is the child's first offense. The research recommends that investigators and prosecutors be more proactive and optimal in pursuing diversion at the initial stage (investigation/prosecution). Failure to diversion at the initial stage often burdens judges at trial. The role of Community Guidance Officers (PK Bapas) is crucial. The capacity and number of PK Bapas need to be increased so that community research reports and post-verdict supervision processes can be implemented optimally across all regions. Evaluating the long-*

*term impact of conditional sentences on children's behavior after the probation period ends to validate the effectiveness of this restorative law enforcement model.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Children, Diversion, Child Protection, Minor Crimes*